
Analisis Peran IMF terhadap Fenomena Inflasi tahun 1997-1998 di Negara Thailand

Aliya Nur Aziza, Audita Fathana, Ayun Faiza Yulianto

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang – Indonesia

Email: aliyaziza2807@gmail.com

Diserahkan: 18 April 2019 | Diterima: 24 April 2019

Abstract

Monetary crisis in Asia is a condition when the huge inflation takes place in almost all of the Southeast Asia countries. Thailand become pioneer of monetary crisis in Asia. The value of the country's currency in Thailand fell due to the government decision in adopting managed-float exchange policy of Baht currency to the Dollar America. This led the government to take the decision for seeking a help from IMF in order to recover their economic stability. However, this attempt became more complicated as a consequence of IMF regulation. IMF could not provide a solution to recover economic crisis as some of the parties disagree with the financial support by providing loan for Asia countries. The inflation also was one of the reasons behind of IMF incapability to provide solutions tackling this issue. Therefore, this paper has the aim to investigate the role of IMF towards the inflation issue in Thailand in 1997-1998. The method used to collect data is to use Internet based research with data analysis techniques using qualitative descriptive methods. The results of this study are that the IMF issued several policies including Monetary Tightening Policy, Fiscal Austerity, and Application of Letter of Intent.

Keywords : Crisis, Asia, Monetary, Thailand, Inflation, IMF.

Abstrak

Krisis moneter Asia pada tahun 1997-1998 menyebabkan Inflasi besar-besaran di kawasan Asia Tenggara. Thailand menjadi negara pemicu krisis moneter yang terjadi di negara Asia. Jatuhnya nilai mata uang Thailand (Baht) disebabkan karena adanya keputusan pemerintah Thailand untuk menerapkan kebijakan 'sistem mengambang' pada nilai tukar Baht terhadap dolar Amerika. Konsekuensinya, pemerintah Thailand mengambil keputusan untuk meminta bantuan kepada IMF dengan tujuan menstabilkan perekonomian mereka kembali. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji peran serta IMF terkait dengan Inflasi yang terjadi pada tahun 1997-1998 di negara kawasan Asia Tenggara khususnya di negara Thailand. Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang menggambarkan atau melukiskan kejadian/peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan. Dalam penelitian ini menghasilkan suatu temuan bahwa dampak fenomena ini tidak hanya dirasakan di negara kawasan Asia Tenggara akan tetapi juga negara lain seperti Amerika Serikat dan Rusia.

Kata Kunci: Krisis, Moneter, Asia, Thailand, Inflation, IMF.

PENDAHULUAN

Pada awal sistem moneter internasional abad ke-19, beberapa negara menggunakan sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*) yang mengacu

pada standar emas (Suseno, 2004). Sistem ini mengalami perubahan sehingga kemudian memunculkan adanya kesepakatan Bretton Woods.

Sistem ini juga tidak mampu bertahan lama, oleh karena itu tiap-tiap negara kemudian diberikan kebebasan untuk menentukan sistem nilai tukar uang mereka sendiri.

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa sistem nilai tukar yang digunakan suatu negara tidak hanya terbatas pada sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*), tetapi juga sistem nilai tukar mengambang (*flexible exchange rate*) atau variasi dari kedua sistem tersebut (Suseno, 2004). Dengan adanya pemberlakuan sistem nilai tukar mengambang, nilai mata uang ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar dan pemerintah tidak perlu lagi menjamin peredaran uang. Dalam penerapannya, sistem ini mampu menutupi defisit pengeluaran pemerintah untuk membiayai dana perang pada saat itu.

Namun sayangnya di tahun 1990, sistem Bretton Woods runtuh dan menyebabkan beberapa negara di Amerika Latin dan Asia menghadapi krisis nilai tukar. Krisis ini pada mulanya berawal di negara Thailand yang kemudian menyebar hingga kebeberapa negara Asia lainnya dan menggoyahkan sistem perekonomian negara-negara tersebut. Tidak hanya itu, dampak dari krisis ini sendiri juga telah menimbulkan gejolak sosial dan politik, sebagaimana yang terjadi di Meksiko dan Brazil, serta di beberapa negara Asia, seperti Indonesia,

Thailand, dan Korea Selatan pada periode tahun 1997-1998.

Dalam menyikapi krisis ini, beberapa negara menerapkan kebijakan yang berbeda-beda. Beberapa negara melepaskan sistem nilai tukar tetap dan menyerahkan mekanisme pasar dalam menentukan kurs, seperti Chili, Thailand dan Indonesia. (Suseno, 2004) Sementara itu, beberapa negara seperti Hongkong, dan Argentina menggunakan *Currency Board System* (CBS) dan Malaysia beralih ke sistem nilai tukar tetap pada tahun 1998. Meskipun demikian, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa banyak negara menggunakan sistem nilai tukar mengambang dibandingkan dengan menggunakan sistem nilai tukar tetap.

Krisis ekonomi yang terjadi antara tahun 1997-1998 merupakan suatu peristiwa yang sampai saat ini masih sangat melekat diingatan masyarakat. Bagaimana tidak, krisis ini menjadikan negara-negara di Asia mengalami keterpurukan ekonomi yang berdampak pada jatuhnya nilai mata uang. Sebut saja Thailand (Baht), Malaysia (ringgit), Singapura (dolar Singapura), Indonesia (rupiah), dan Korea Selatan (won) (Nugroho, 2015) Bila dilihat dalam hitungan persen Korea Selatan mengalami penurunan -39,0% untuk (won), Thailand -37,5% untuk (Baht), dan Indonesia -73,9% untuk (rupiah) (Nugroho, 2015).

Dalam rincian yang dipaparkan tersebut terlihat bahwa Indonesia merupakan negara yang terkena dampak paling parah pada saat itu. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga kurang memberikan perhatian kepada kondisi masyarakatnya sehingga banyak terjadi fenomena kemiskinan, sebagian juga diperberat karena adanya musibah nasional yang bertubi-tubi, seperti kekeringan yang menyebabkan kegagalan panen, serta adanya kebakaran hutan di Indonesia. Tidak hanya itu, sektor konstruksi mengalami kontraksi 36,44% disusul oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa-jasa perusahaan dengan produksi terbesar terjadi pada industri berat seperti mesin-mesin, baja, otomotif, dan bahan konstruksi (Fatimah, 2008).

Fenomena yang saling berhubungan tersebut kemudian membuat pemerintah memusatkan kebijakan program dan pendanaannya kepada Jaring Pengaman Sosial (JPS), restrukturisasi sektor moneter, dan rekapitulasi perbankan (Hadiwinata, 2002). Akibat dari adanya kebijakan itu, terjadilah perubahan harga barang yang semakin cepat dan menyebabkan meningkatnya jumlah Inflasi, khususnya di negara kawasan Asia.

Awal mula krisis moneter yang berujung pada inflasi di negara Asia pada saat itu adalah berasal dari negara Thailand. Jatuhnya mata uang baht milik Thailand tahun 1997 berdampak

pada merosotnya perekonomian negara-negara di kawasan Asia. Krisis ini tidak hanya dirasakan di negara Thailand saja akan tetapi juga berdampak pada negara Rusia, Amerika Latin dan bahkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya.

Penurunan tingkat suku bunga di Amerika Serikat dan Eropa membuat terjadinya peningkatan tajam arus kapital yang masuk di Asia antara tahun 1990 hingga 1996 (Fatimah, 2008). Thailand yang menerima arus portfolio tinggi juga mulai kehilangan momentum ekspor sehingga defisit dalam *balance of payment* mengakibatkan devaluasi drastis nilai Baht pada tahun 1997 (Fatimah, 2008). Devaluasi tinggi yang terjadi di Thailand mengakibatkan adanya perpindahan uang dalam jumlah yang besar dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan menghindari kerugian akibat memburuknya ekonomi atau politik di negara Thailand pada saat itu.

Melihat fenomena tersebut, pemerintah negara Thailand tidak tinggal diam. Mereka mengubah kebijakan nilai tukar baht yang awalnya mengambang terkendali menjadi mengambang bebas. Hal ini dilakukan untuk mengamankan cadangan devisa dari spekulasi mata uang serta untuk merangsang pendapatan ekspor (Purnamasari, 2017). Melihat krisis yang semakin parah, pemerintah Thailand akhirnya memutuskan untuk

meminta bantuan IMF terkait dengan krisis moneter yang terjadi di negaranya.

IMF (*International Monetary Fund*) adalah suatu badan institusi moneter internasional yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menangani segala macam isu dan permasalahan yang ada dalam sistem ekonomi politik Internasional (Seta, 2017) Dalam krisis moneter yang terjadi di negara Thailand, IMF turut serta membantu keterpurukan ekonomi di Thailand dengan memberikan pinjaman dana yang bertujuan agar negara tersebut dapat melakukan sistem pembangunan dan mengangkat perekonomian mereka dari keterpurukan. IMF juga melakukan upaya berupa intervensi terhadap situasi krisis perekonomian di negara Thailand melalui peningkatan atas nilai tukar mata uang negara-negara yang mengalami krisis finansial (Seta, 2017). Tidak hanya itu, Thailand juga melakukan pemaksaan terhadap organisasi atau institusi perekonomian di negara tersebut agar meninggikan suku bunga, dimana peningkatan suku bunga tersebut memiliki tujuan dalam mengurangi peredaran mata uang Bath dalam pasar (Seta, 2017). Total bantuan yang diterima oleh Thailand dari IMF mencapai US\$17,2 miliar namun sayangnya bantuan tersebut tetap tidak bisa mengatasi inflasi di Thailand karena adanya pesimisme dari kalangan pelaku pasar dalam

negeri terhadap program yang diberikan oleh IMF. Di sisi lain juga bantuan dana yang diberikan oleh IMF ini dianggap tidak efektif karena pada saat itu banyak pihak yang berspekulasi bahwa negara-negara yang mengalami krisis moneter akan sangat kesulitan mengembalikan dana yang dipinjam dari IMF. Semakin besar tanggungan dana suatu negara, maka akan semakin tinggi pula peningkatan krisis ekonomi suatu negara.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah merujuk pada peran IMF terkait dengan fenomena inflasi yang terjadi di negara Thailand pada tahun 1997-1998. Tujuan penulisan jurnal/makalah ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat, khususnya mahasiswa mengenai awal mula krisis moneter yang menyebabkan jatuhnya nilai mata uang (Baht) di negara Thailand, serta menjelaskan secara rinci tentang peran IMF terhadap krisis moneter yang terjadi di negara tersebut. Dengan adanya tulisan ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran secara nyata kepada masyarakat tentang inflasi parah yang terjadi sehingga mengakibatkan keterpurukan ekonomi Thailand pada saat itu.

KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori *Third*

Generation Model (TGM). TGM merupakan model generasi ketiga krisis keuangan dimana teori ini muncul karena teori krisis keuangan yang pertama dan kedua tidak bisa menjelaskan krisis keuangan yang terjadi di Asia Timur ditahun 1997-1998 (Haryanto dan Keuangan, 2019). Badai krisis Asia tahun 1998 juga mengilhami munculnya teori krisis *Third Generation Model* (TGM). Oleh beberapa pengamat, TGM sering dikonotasikan sebagai *Asian Crisis*.

Krisis ini diawali kejatuhan nilai mata uang baht (Thailand), diikuti kejatuhan nilai won (Korea). Krisis kemudian menjalar ke Indonesia, Malaysia, Filipina dan beberapa negara Asia lainnya. Secara umum, penyebab utama terjadinya TGM adalah perilaku *moral hazard* dan *balance sheet effects* yang tidak terkontrol. *Moral Hazard* muncul akibat implisit government guarantee yang siap membailout perusahaan swasta dan bank yang dalam masalah serta menjamin keuntungan masa depan investor. Akibatnya terjadilah *excessive borrowing dan lending* secara masif dalam industri perbankan (Sari, 2016).

Akar penyebab krisis di Asia saat itu (Thailand) adalah *moral hazard* karena peminjam memperoleh keuntungan untuk mengalihkan proyeknya pada proyek yang beresiko tinggi, dimana hal tersebut tidak diinginkan oleh pemberi pinjaman

yang apabila berhasil, dapat memberikan keuntungan yang besar dan apabila gagal akan ditanggung oleh pemberi pinjaman dalam bentuk tidak kembalinya kredit yang diberikan. Di sisi lain, *moral hazard* ini menyebabkan sektor perbankan mengalami ketidakstabilan sehingga menyebabkan terjadinya krisis yang akan mendorong penarikan secara besar-besaran (*rush*) oleh nasabah dan perbankan akan mengalami kegagalan/kolaps (Sari, 2016). Contoh kasus dari krisis generasi ketiga ini adalah krisis di Asia tahun 1997-1998 terutama pada Thailand pada tahun 1997 dimana nilai baht turun. Pada saat itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai negara ini dapat dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Saat krisis ini menyebar, nilai mata uang di sebagian besar Asia Tenggara dan Jepang ikut turun.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi dan *Internet Based Research*. Studi dokumentasi yakni studi kepustakaan di mana peneliti berusaha meneliti dokumen, catatan, dan arsip serta laporan penelitian yang sudah ada namun tetap dapat dipertanggungjawabkan (Domai, 2015). Pada studi kasus peran IMF

dalam menangani krisis ekonomi di Thailand ini, peneliti menggunakan data yang berasal dari dokumen resmi, seperti perjanjian yang dibuat IMF dengan Thailand, catatan mengenai IMF beserta kebijakannya dalam menangani inflasi yang ada di Thailand.

Sedangkan yang dimaksud dengan *internet based research* adalah teknik pengumpulan data yang dimana data-data penelitian bersumber dari internet seperti contohnya Ensiklopedia, E-Journal, E-Book dan berita online. Data yang dipaparkan dalam penelitian ini mayoritas diambil dari website dan berita online resmi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif adalah teknik penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Lubis, 2014). Pada penelitian ini, peneliti berusaha menggali lebih dalam tentang bagaimana peran IMF sehingga krisis ekonomi yang dialami oleh Thailand dapat teratasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetatan Moneter terhadap Suku Bunga

Perubahan suku bunga akan mempengaruhi nilai mata uang sebuah negara terhadap dolar. Kenyataan ini terjadi pada saat negara Thailand dilanda krisis ekonomi di tahun 1997, yang kemudian menyebabkan inflasi parah hingga menyebar ke beberapa negara Asia lainnya. Krisis moneter mendorong pemerintah Thailand untuk menaikkan suku bunga dengan tujuan menyelamatkan negara dari keterpurukan ekonomi yang terjadi.

Pada saat itu, pemerintah terpaksa menguras cadangan devisa negara untuk mempertahankan nilai tukar Baht. Namun sayangnya, usaha pemerintah ini sia-sia dan justru menyebabkan semakin melemahnya nilai tukar Baht terhadap dolar. Krisis ini menyebabkan terjadinya arus keluar modal (*capital flight*), penutupan sejumlah bank akibat terjadi *rush*, sehingga memaksa negara Thailand dan Indonesia untuk mengucurkan dana sebesar Bt. 300 miliar (sekitar USD 5,5 miliar- kurs akhir tahun 1998) dan Indonesia harus kucurkan *bailout* sebesar Rp 144,5 triliun (disebut BLBI, yang kemudian membengkak menjadi Rp 600 triliun bila ditambah beban bunga hingga tahun 2030) (Sandra, 2018).

Terpuruknya ekonomi Thailand saat itu menyebabkan negara ini kesulitan untuk menghadapinya. Dalam menyiasati hal tersebut, Pemerintah kemudian meminta

bantuan kepada IMF untuk meminjamkan dana yang dimana tujuannya adalah untuk memperbaiki perekonomian Thailand.

***Austerity* Fiskal**

Austerity fiskal atau pengetatan anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang ditetapkan pada pemerintah yang bertujuan mengurangi nilai defisit anggaran. *Austerity* fiskal adalah salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh IMF ketika suatu negara sedang mengalami kesulitan dalam hal keuangan (Fakta, 2017). Krisis ekonomi Asia yang terjadi pada tahun 1997 menjadi krisis yang hampir menghancurkan perekonomian di Asia pada saat itu. Dimana cikal bakal dari krisis itu terjadi di Thailand yang menetapkan nilai mata uang mengambang, sehingga mengalami kemerosotan terhadap nilai mata uang dolar.

Oleh karena itu, intervensi dari IMF diperlukan guna menstabilkan kembali perekonomian yang ada di Thailand. Program-program yang ditawarkan IMF secara perlahan membantu Thailand untuk memperbaiki kondisi ekonomi dalam negeri yang tidak stabil. Pasalnya, pemerintah Thailand juga harus melihat timbal balik yang terjadi, apakah hal tersebut berdampak kepada sektor domestik atau tidak. Salah satunya adalah penerapan program

austerity fiskal. Program pengetatan anggaran ini diterapkan oleh Pemerintah Thailand. Namun sebagian pihak justru menganggap bahwa program ini hanya menguntungkan pihak kaya saja dan mengabaikan kaum buruh (Lumanauw, 2017). Pasalnya, penutupan bank, pemotongan pengeluaran, dan kenaikan suku bunga tetap memberikan pengaruh buruk terhadap kestabilan ekonomi yang ada di Thailand. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kaum kaya dan miskin.

Dalam pengetatan anggaran pemerintah berusaha sebisa mungkin meminimalisir perbaikan sistem perawatan kesehatan dan sistem pendidikan serta manufaktur industri yang dampaknya malah semakin anjlok, membuat kondisi dalam negeri semakin memburuk. Meski pada hakikatnya, hal ini akan berdampak pada sistem perekonomian eksternal, namun pemerintah juga perlu menata ulang agar keseimbangan kedua pihak dapat terkendali.

Penerapan *Letter of Intent (LoI)*

Thailand menandatangani *Letter of Intent* pertamanya pada tanggal 14 Agustus tahun 1997. Pada saat itu, Dewan IMF menyetujui untuk memberikan bantuan sebesar SDR 2,9 milyar (SDR = kelompok mata uang

cadangan), atau dalam USD 4 milyar atau setara dengan 505% dari kuota yang ada pada waktu itu di Thailand, yang ditetapkan selama periode 34 bulan (Camdessus, 1997). Dalam isi dari *Letter of Intent* yang dilakukan Thailand pada IMF berisikan kebijakan rancangan yang dijadikan patokan dalam menstabilkan ekonomi Thailand tersebut. Kebijakan tersebut berisi : 1) Pada tahun pertama Thailand akan menyelesaikan fokus pada pasar pertukaran, reformasi sektor keuangan, dan kebijakan fiskal yang bertujuan guna mendisiplinkan perekonomian kembali. Kebijakan tersebut dipercaya dapat mengembalikan kepercayaan pasar ke tingkat tinggi yang berlangsung dari tahun - tahun sebelumnya. Selain itu, kebijakan ini juga akan melakukan penutupan terhadap lembaga keuangan yang memiliki kinerja lemah dan rekapitalisasi terhadap sistem perbankan; 2) Tindakan guna menyeleksi ulang defisit sektor publik dalam 1% dari anggaran dan memperbesar sektor pinjaman; 3) Kerangka kerja baru dalam membuat kebijakan uang ketat, sehingga arus modal yang keluar lebih sedikit dan menstabilkan nilai tukar mata uang ; dan 4) Memanfaatkan peran sektor swasta dalam reformasi pelayanan publik guna menarik modal asing.

Pada LoI selanjutnya IMF memberikan kebijakan untuk

membuka perekonomian pada modal asing, *feedback* dari pemerintah dengan menerapkan suku bunga di atas 2% dan menutup institusi-institusi keuangan. Namun, karena adanya tekanan dari NGO (*Non Government Organizations*) dan pihak kaum bisnis, yang menganggap bahwa program yang diberikan oleh IMF mengabaikan kepentingan kaum buruh dan hanya ditujukan pada kelompok pebisnis saja dan atas hal tersebut menyebabkan pada LoI yang keempat pemerintah berfokus pada membuang penghematan dan meminimalisasi penurunan ekonomi dan berusaha mencapai pemulihan tahap awal. Setelah beberapa LoI Thailand memberikan perkembangan yang baik, hingga pada LoI yang ketujuh dan kedelapan Thailand memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999 menjadi 3-4%.

Program-program penyesuaian yang diberlakukan IMF membawa pengaruh pesat terhadap penstabilan ekonomi yang ada di Thailand. Sejak pertengahan tahun 2000, Thailand sudah tidak pernah menarik dana lagi kepada IMF, dari keuangan resmi sebanyak 17,2 milyar dolar, 14,3 milyar dolar didapat dari penarikan kontributor bilateral dan multilateral, meski sebagiannya juga masih ditarik pada IMF.

Keberhasilan Thailand dalam menstabilkan kembali perekonomian

terdiri dari berbagai faktor yakni, Thailand lebih mendekati pada sektor riil, dengan didukung oleh kondisi politik yang terinstitusionalisasi dengan baik. Kebijakan yang dibuat pun berfokus untuk merubah ke berbagai sektor, utamanya pada sektor keuangan.

KESIMPULAN

Krisis keuangan Asia di tahun 1997 menjadi salah satu bumerang yang hampir mengakibatkan hancurnya perekonomian negara-negara di kawasan Asia. Krisis yang terjadi akibat merosotnya nilai mata uang ini, menimbulkan masalah keuangan dan menyebabkan perusahaan kehilangan kepercayaan yang berujung pada kebangkrutan. Krisis keuangan Asia, sebenarnya krisis yang menyudutkan negara Thailand. Di mana penyebab utama atas kemunculan dari krisis ini adalah dari ketidaksadaran Thailand telah mengalami *moneypolitics* oleh investor asing.

Selama rentang 10 tahun antara tahun 1897 sampai 1997 defisit transaksi terus meningkat mencapai 7,887% dari total GDP. Para investor memanfaatkan pinjaman *Bangkok International Banking Facility* yang memiliki nilai relatif murah dalam pinjaman. Karena prediksi devaluasi mata uang yang semakin meningkat,

pemerintah berusaha melindungi serangan terhadap Baht Thailand.

Pemerintah awalnya mencoba untuk membeli kembali Baht untuk mempertahankan dana cadangan Internasional, namun kegagalan atas penyelamatan memaksa pemerintah untuk mengambang mata uang tersebut, pada awalnya pemerintah menetapkan sistem mata uang mengambang terkendali pada baht, namun usaha penyelamatan yang semakin merosot akhirnya pemerintah menetapkan mata uang mengambang bebas pada baht yang membuat Thailand akhirnya mau menerima tawaran dari pihak IMF untuk menstabilkan kembali perekonomian negara tersebut.

Terdapat beberapa kebijakan IMF yang telah diberlakukan pada Thailand seperti menerapkan *Letter of Intent*, menaikkan suku bunga, serta pengetatan anggaran. Tujuan awal digunakan untuk mengelola nilai mata uang baht yang mengambang, merestrukturisasi lembaga keuangan Thailand, memotong pengeluaran publik, mempromosikan sektor swasta, dan untuk menarik lebih banyak modal asing.

REFERENSI

- Berita Satu. (2017) *Kebijakan ala IMF Gagal* (Online). Tersedia di: <http://beta.investor.id/macroeconomics/kebijakan-ala-imf-gagal> (Diakses: 22 Februari 2019).

- Domai, T. H. L. (2015) *Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Ranga Keterbukaan Informasi Publik*. Malang: UB Press.
- Fatimah, E. K. (2008) "Krisis Ekonomi Indonesia" (Online).. *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 2 No. 2, pp. 164-173. Tersedia di: <https://jiae.ub.ac.id/index.php/jiae/article/view/142/111> (Diakses: 30 Januari 2019).
- Hadiwinata, B. S. (2002) *Politik Bisnis Internasional*. Yogyakarta: Kanisius.
- Haryanto, J.T. Keuangan, K. (2015) *Pembelajaran Teori Krisis* (Online). Tersedia di: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/pembelajaran-teori-krisis/> (Diakses: 5 Februari 2019).
- IMF. (1997) *Thailand Letter of Intent 14 August 1997* (Online). Tersedia di: <https://www.imf.org/external/np/loi/081497.htm> (Diakses: 22 Januari 2019).
- Purnamasari, D. (2017) *Negara-negara yang Paling Terpuruk Saat Krisis Ekonomi ASEAN* (Online). Tersedia di: <https://tirto.id/negara-negara-yang-paling-terpuruk-saat-krisis-ekonomi-asean-csSK> (Diakses: 20 Februari 2019).
- Sandra, G. (2018) *Perbedaan Penanganan Krisis Asia 1997-1998 di Malaysia vs Thailand dan Indonesia* (Online). Tersedia di: <https://ekbis.rmol.id/read/2018/05/12/339586/perbedaan-penanganan-krisis-asia-1997-1998-di-malaysia-vs-thailand-dan-indonesia> (Diakses 19 Februari 2019)
- Sari, P. K. (2016) *Identifikasi Penyebab Krisis Moneter Dan Kebijakan Bank Sentral Di Indonesia: Kasus Krisis Tabun (1997-1998 dan 2008)* (Online). Thesis Universitas Syah Kuala. Tersedia di: <http://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=26024&page=1> (Diakses: 15 Februari 2019).
- Seta, M. A. (2017) *Peran IMF dalam Krisis Finansial Asia* (Online). Tersedia di: http://mochamad-arya-seta-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-170201-Ekonomi%20Politik%20Internasional-Peran%20IMF%20Dalam%20Krisis%20Finansial%20di%20Asia.html (Diakses: 10 Februari 2019)
- Suseno, I. S. (2004) *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.
- IMF. (2017) *Sekilas tentang IMF* (Online). Tersedia di: <https://www.imf.org/id/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance> (Diakses: 22 Januari 2019).
- Lubis. E. (2014) *Penelitian Deskriptif (Kualitatif)* (Online). Tersedia di: https://www.academia.edu/30373783/PENELITIAN_DESKRIPTIF_KUALITATIF (Diakses: 5 Februari 2019).
- Nugroho, G. (2011) *Peranan IMF dalam Penanganan Krisis Ekonomi Indonesia 1997/1998* (Online). Tersedia di: <https://www.kompasiana.com/galihnugroho/5500a82ba33311e772511915/peran-imf-dalam-penanganan-krisis-ekonomi-di-indonesia-1997-1998> (Diakses: 22 Februari 2019).